

# RENSTRA

## KECAMATAN KABUH

### TAHUN 2025-2029



**KECAMATAN KABUH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**JOMBANG**

Jalan Raya Ploso-Babat No. 5 Telepon (0321) 888826  
KABUH 61455

## **BABI V**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang sistematis, terarah, dan terpadu dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan yang baik tidak hanya berperan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja serta menjamin akuntabilitas pelaksanaan program di setiap jenjang pemerintahan. Dalam kerangka otonomi daerah, perencanaan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kecamatan Kabuh sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah memiliki tugas strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016, Kecamatan bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dilimpahkan oleh Bupati. Dengan peran sebagai simpul koordinasi dan fasilitasi antar lembaga di tingkat kecamatan, Kecamatan Kabuh memiliki posisi penting dalam menjamin keterpaduan pembangunan wilayah yang langsung menyentuh masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabuh Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari pelaksanaan siklus perencanaan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun sebagai dokumen pengarah strategis lima tahunan yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat operasional dan aplikatif, Renstra ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahun.

Landasan hukum yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kabuh adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta penyusunan dan perubahan dokumen RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga secara substansial merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut mengarahkan agar dokumen Renstra disusun dengan pendekatan kinerja, berbasis data dan informasi yang valid, serta menjamin keterkaitan antara indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan sasaran strategis RPJMD. Renstra juga harus memperhatikan kontribusi perangkat daerah terhadap prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, khususnya melalui delapan agenda strategis nasional yang dikenal sebagai Asta Cita.

Dalam konteks ini, Renstra Kecamatan Kabuh diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian Asta Cita, antara lain dalam memperkuat pelayanan publik dasar, memperkuat birokrasi yang profesional dan melayani, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta meningkatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan. Beberapa subkegiatan kecamatan, seperti peningkatan kualitas pelayanan, administrasi kependudukan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, secara langsung mendukung Asta Cita ke-7, yaitu **"Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pencegahan Korupsi"**.

Lebih lanjut, pendekatan perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kabuh Tahun 2025–2029 menggunakan prinsip cascading, yaitu penjenjangan logis dari visi dan misi kepala daerah ke dalam sasaran RPJMD, yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, termasuk indikator kinerja dan program. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan akan terintegrasi secara vertikal dan horizontal, serta mendukung pencapaian outcome pembangunan nasional secara terarah.

Renstra ini tidak hanya menyusun agenda kerja selama lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi dokumen strategis yang menjamin keterpaduan antara kebijakan makro dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat lokal. Dengan demikian, penyusunan Renstra Kecamatan Kabuh Tahun 2025–2029 memiliki arti penting sebagai manifestasi komitmen perangkat daerah dalam mendukung tujuan pembangunan nasional dan daerah, serta memperkuat pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan di wilayah Kecamatan Kabuh.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kabuh Tahun 2025 - 2029 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023- 2043;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
21. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 000.7.2/100/415.01/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan setiap tahun anggaran. Rencana strategis Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang merupakan dokumen yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman bagi seluruh komponen pemerintah Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

Renstra Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tahun Tahun 2025-2029 sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang yang harus dilaksanakan guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait kedudukannya sebagai unsur perencana pembangunan daerah;
3. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Kecamatan Kabuh;
4. Mendukung seluruh jajaran Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 5 tahun.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kabuh ini sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KABUH</b>
2.1	Gambaran Pelayanan Kecamatan Kabuh
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kabuh
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
3.1	Tujuan Renstra Kecamatan Kabuh
3.2	Sasaran Renstra Kecamatan Kabuh
3.3	Strategi Kecamatan Kabuh
3.4	Arah Kebijakan Kecamatan Kabuh
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kabuh**

##### **2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Kabuh**

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin

Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### **1. Camat**

Kantor Kecamatan Kabuh dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran

- dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
  - Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
  - Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi**

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi produk hukum desa;
- j. Melaksanakan pembinaan tata kelola keuangan desa dan aset desa;
- k. Melaksanakan pembinaan dan monitoring SID (Sistem Informasi Desa);
- l. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyusunan LPPDes dan LKPJ
- m. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi lembaga ekonomi desa seperti BUMDes, UPK, BKD, Pasar Desa; dan
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang

- pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lembaga masyarakat desa seperti PKK, LPMD, KPMD, dan Pokmas; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **5. Seksi Sosial Budaya**

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi dan penanggulangan kemiskinan melalui program – program bantuan sosial;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan PHBN dan PHBA;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

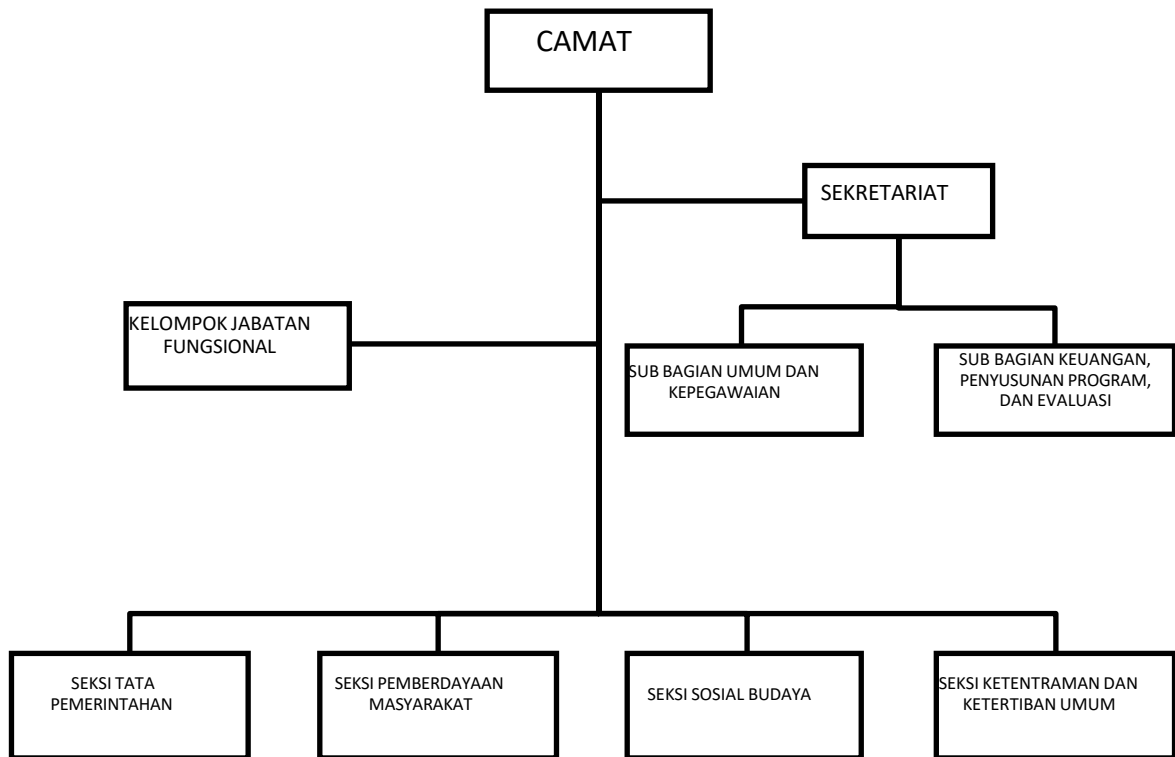
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang

- ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
  - i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Kabuh tersaji dalam Gambar 2.1. Sedangkan rincian personil pegawai, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang per bulan Juni 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Kabuh**



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

### 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Kabuh

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan institusi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Aparatur Kecamatan sebagai unsur pemerintah sebagai pelayan masyarakat sudah pasti akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan, masyarakat maupun organisasi pemerintah daerah di atasnya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, aparatur kecamatan dituntut berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan

lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi serta loyalitas.

Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Kantor Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Eselon dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	2 orang
2.	Golongan III	6 orang
3.	Golongan II	4 orang
4.	Golongan I	-
5.	Golongan V (PPPK)	2 orang
Jumlah		14 orang

Sumber Data: SIAP ASN

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kantor Kecamatan Kabuh yang terbanyak golongan III, sebanyak 6 orang. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana, baik dengan latar belakang teknis maupun sosial.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Eselon**

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	-
2	Eselon III	2 orang
3	Eselon IV	5 orang
4	Pelaksana	7 orang
Jumlah		14

Sumber Data: SIAP ASN

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
SLTA	6 orang
Diploma (D3)	1 orang
Sarjana (S1)	4 orang
Magister (S2)	3 orang
Jumlah	14 orang

Sumber Data: SIAP ASN

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Kantor Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang yang paling banyak adalah Sarjana, yang rata-rata pada posisi jabatan struktural eselon III dan IV. Peningkatan kapasitas ASN melalui peningkatan jenjang pendidikan mempengaruhi kualitas pelayanan dan pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Sedangkan bila dilihat dari komposisi pegawai Kantor Kecamatan Kabuh berdasarkan pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jenis Diklat</b>		
		<b>Struktural / Kepemimpinan</b>	<b>Fungsional</b>	<b>Teknis</b>
1	Struktural	Diklatpim III: 2 orang Diklatpim IV: 3 orang	-	-
2	Fungsional Khusus	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-

Sumber Data: SIAP ASN

Saat ini Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang menempati gedung kantor yang berada di Jl. Raya Ploso-Babat No. 5 Kabuh. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Inventaris Barang**

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Kendaraan Dinas Jabatan</b>				
1	Kendaraan Dinas R4	2	1	1	-
2	Kendaraan Dinas R2	11	8	3	-
3	Mobil Siaga Desa	-	-	-	-
4	Kendaraan Dinas R2 (Desa)	21	21	-	-
<b>II</b>	<b>Perlengkapan Gedung Kantor</b>				
1	Scanner	1	1	-	-
2	AC	8	4	3	1
3	Filling Besi	7	2	5	-
4	Rak Kayu	2	2	-	-
5	White Board	1	-	1	-
6	Lemari Kayu	5	5	-	-
7	Dispenser	1	1	-	-
8	Tempat Tidur Kayu	1	1	-	-
9	Meja Rapat	8	5	3	-
10	Meja Tulis ½ biro	16	10	-	6
11	Kursi Rapat	72	72	-	-
12	Kursi Biasa	8	8	-	-
13	Kursi Tamu	2	2	-	-
14	Bangku Tunggu	2	2	-	-
15	Kursi Lipat	8	7	-	1

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
16	Kursi Putar	1	1	-	-
17	Meja Komputer	2	2	-	-
18	Podium	1	1	-	-
19	Televisi	4	3	-	1
20	P C	3	2	1	-
21	Laptop	6	3	3	-
22	Printer	3	3	-	-
23	Meja kerja	1	1	-	-
24	Sound system	5	3	-	2
25	Alat pemadam	1	1	-	-
26	Papan nama	1	1	-	-
27	Sofa	1	1	-	-
28	Lemari Es	-	-	-	-
29	Proyektor + Attachment	1	1	-	-
30	Generator	-	-	-	-
31	Bangunan Gedung kantor permanen	1	1	-	-
32	Tempat Ibadah Permanen	1	1	-	-
33	Gedung Pos Jaga Permanen	-	-	-	-
34	Rumah tempat tinggal permanen kelas Ia	1	1	-	-
35	Balai gedung pertemuan	1	1	-	-

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
36	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	-	-	-	-
37	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	-	-
38	Maket dan Foto Dokumen Lain-lain	-	-	-	-

*Sumber Data : Kartu Inventaris Barang (KIB)*

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kabuh**  
**Tahun 2020 s/d 2024**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	<b>NILAI IKM</b>		√		94,84	N/A	N/A	N/A	N/A	80,04	N/A	N/A	N/A	N/A	110,26	N/A	N/A	N/A	N/A
2	<b>Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabuh Minimal BAIK</b>				78,50	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	90,20	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa				22	N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum				8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				11	N/A	N/A	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja Bidang Sosial dan Budaya				16	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
7	<b>Nilai Evaluasi SAKIP</b>				70,01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>				100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				20	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
10	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan</b>				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
11	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Jumlah gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara				3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang terbangun				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				6	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
17	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	<b>Persentase dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>				100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Jumlah Dokumen Renstra Kec. Kabuh yang tersusun				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah Dokumen Renja Kec. Kabuh yang tersusun				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Jumlah dokumen Laporan LKJIP Kec. Kabuh yang tersusun				1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Jumlah dokumen laporan keuangan Kec. Kabuh yang tersusun				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
1	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>		√		N/A	66	73,39	N/A	N/A	N/A	60,89	61,81	N/A	N/A	N/A	92,26	84,22	N/A	N/A
2	<b>Nilai SAKIP</b>				N/A	70,01	71	N/A	N/A	N/A	70,09	70,17	N/A	N/A	N/A	100,11	98,83	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
4	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
5	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
6	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun				N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
7	<i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
8	<i>Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
9	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Kabuh yang difasilitasi				N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
11	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD				N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
12	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Kabuh				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
13	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
15	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
16	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
17	Jumlah pemenuhan barang cetak				N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
18	Jumlah pemenuhan barang penggandaan				N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
19	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan				N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
21	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.				N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
22	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
23	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor				N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
25	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
26	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi				N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
27	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum				N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
28	Jumlah penyediaan benda pos				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
29	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
30	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
31	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.				N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
32	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Kabuh yang dipelihara				N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
33	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
34	<b>INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		√		N/A	7,90	7,99	N/A	N/A	N/A	7,86	8,20	N/A	N/A	N/A	99,49	102,63	N/A	N/A
35	<b>IKM Kecamatan Kabuh</b>				94,84	94,84	93,80	N/A	N/A	80,04	87,15	94,22	N/A	N/A	N/A	99,86	91,89	N/A	N/A
36	<b>IPP Kecamatan Kabuh</b>				N/A	2,70	3,30	N/A	N/A	N/A	3,388	3,49	N/A	N/A	N/A	98,78	125,48	N/A	N/A
37	<b>Nilai Paten Kecamatan</b>				N/A	79	83,25	81	88,90	N/A	82,42	86,31	88,81	86,09	N/A	99,18	103,68	109,64	96,83
38	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>				N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
39	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
40	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
41	<b>Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan</b>				N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
42	<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>				N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
44	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
46	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	<b>Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait</b>				N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
48	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait</b>				N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
49	<i>Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum</i>				N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
50	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
51	<b>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu</b>				N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
52	<b>Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa</b>				N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
53	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti</b>				N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
54	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
55	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
56	<b>Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu</b>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
57	<b>Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi</b>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
58	<b>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>				N/A	32	32	N/A	N/A	N/A	32	32	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
59	<i>Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa / Perubahan APB Desa yang tepat waktu</i>				N/A	32	32	N/A	N/A	N/A	32	32	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
60	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>				N/A	32	32	N/A	N/A	N/A	32	32	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
61	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa				N/A	32	32	N/A	N/A	N/A	32	32	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
62	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan				N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
63	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan				N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
1	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>		√		N/A	N/A	N/A	61	N/A	N/A	N/A	N/A	75,40	N/A	N/A	N/A	N/A	123,61	N/A
2	<b>Nilai Evaluasi AKIP Kec. Kabuh</b>				N/A	70,01	N/A	72,10	73	N/A	67,49	N/A	72,51	72,97	N/A	96,40	100,56	99,95	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>				<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100
5	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				N/A	3	N/A	3	2	N/A	3	N/A	3	2	N/A	100	N/A	100	100
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	5	N/A	5	5	N/A	5	N/A	5	5	N/A	100	N/A	100	100
7	<i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>				N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100
8	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100
9	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				N/A	14	N/A	13	14	N/A	14	N/A	13	14	N/A	100	N/A	100	100
10	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				N/A	1	N/A	1	1	N/A	1	N/A	1	1	N/A	100	N/A	100	100
12	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Kabuh				N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100
13	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>				N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100
15	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	100	100
16	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100
17	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	100	100
18	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
19	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				N/A	3	N/A	4	4	N/A	3	N/A	4	4	N/A	100	N/A	100	100
20	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	100	100
21	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100
22	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	9	11	N/A	N/A	N/A	9	11	N/A	N/A	N/A	100	100
24	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100	N/A	100	N/A	100	100
26	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	24	24	N/A	N/A	N/A	24	24	N/A	N/A	N/A	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
27	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	25	25	N/A	N/A	N/A	25	25	N/A	N/A	N/A	100	100
28	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	100	N/A	85	100	N/A	100	N/A	85	100	N/A	100	N/A	100	100
30	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				N/A	19	N/A	10	10	N/A	19	N/A	10	10	N/A	100	N/A	100	100
31	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				N/A	3	N/A	N/A	1	N/A	3	N/A	N/A	1	N/A	100	N/A	100	100
32	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				N/A	3	N/A	1	N/A	N/A	3	N/A	1	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A
33	<b>INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		√		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>8,11</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>8,76</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>108,01</b>
34	<b>IKM Kecamatan Kabuh</b>				<b>N/A</b>	<b>94,84</b>	<b>88,54</b>	<b>94,84</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>87,15</b>	<b>87,15</b>	<b>96,82</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>91,89</b>	<b>98,43</b>	<b>108</b>	<b>N/A</b>
35	<b>IPP Kecamatan Kabuh</b>				<b>N/A</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>3,60</b>	<b>8,11</b>	<b>N/A</b>	<b>3,388</b>	<b>2,43</b>	<b>3,31</b>	<b>8,76</b>	<b>N/A</b>	<b>93,88</b>	<b>90</b>	<b>91,94</b>	<b>108,01</b>
36	<b>Nilai Paten Kecamatan</b>				<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>81</b>	<b>88,90</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>88,81</b>	<b>86,09</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>109,64</b>	<b>97,7</b>

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
37	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>				N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100
38	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100
39	<b>Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan</b>				<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
40	<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>				<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
41	<i>Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA</i>				N/A	N/A	N/A	1	5	N/A	N/A	N/A	1	5	N/A	N/A	N/A	100	100
42	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>				N/A	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	100	100
43	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				N/A	N/A	N/A	100	150	N/A	N/A	N/A	100	150	N/A	N/A	N/A	100	100
44	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	100	100
45	<b><i>Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait</i></b>				<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
46	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait</b>				N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100
47	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
48	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
49	<b>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu</b>				N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100
50	<b>Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa</b>				N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100
51	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti</b>				N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100
52	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
53	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
	<b>Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu</b>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
55	<b>Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi</b>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
56	<b>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>				N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
57	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>				N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
58	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
1	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>		√		N/A	N/A	N/A	N/A	62	N/A	N/A	N/A	N/A	66	N/A	N/A	N/A	N/A	90
2	<b>Nilai evaluasi AKIP Kec. Kabuh</b>				N/A	N/A	N/A	N/A	73	N/A	N/A	N/A	N/A	72,97	N/A	N/A	N/A	N/A	99,95
3	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
5	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
7	<i>Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
8	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
9	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				N/A	N/A	N/A	N/A	14	N/A	N/A	N/A	N/A	14	N/A	N/A	N/A	N/A	100
10	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100
11	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100
12	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Kabuh</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
13	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100
14	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
15	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100
16	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100
17	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100
18	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100
19	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100
20	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100
21	<i>Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
22	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	N/A	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
23	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	100
26	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	100
27	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	85	100	N/A	N/A	N/A	100
28	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya				N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	100
29	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	100
30	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100
<b>31</b>	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh</b>		√		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>8,11</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>8,76</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>108,01</b>
<b>32</b>	<b>Nilai PATEN Kecamatan</b>				<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>88,90</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>86,09</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>
33	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
34	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100
35	<b>Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan</b>				<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>
36	<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>				<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>
37	<i>Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100
38	<i>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100
39	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				N/A	N/A	N/A	N/A	150	N/A	N/A	N/A	N/A	150	N/A	N/A	N/A	N/A	100
40	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100
41	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait</b>				<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
42	<i>Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
43	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100
<b>44</b>	<b>Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu</b>				<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>
45	<i>Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	100
46	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	100
<b>47</b>	<b>Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif</b>				<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>
48	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A	N/A	100
49	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes				N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
50	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100
51	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	96	N/A	N/A	N/A	N/A	96	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Berdasarkan tabel 2.6 hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama Kecamatan Kabuh selama periode pelaksanaan Renstra, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan publik telah menunjukkan tren yang konsisten dan stabil dalam pencapaian target. Hal ini tercermin dari banyaknya indikator yang telah mencapai nilai capaian 100% atau lebih, menandakan bahwa target yang ditetapkan dalam Renstra dapat direalisasikan sesuai rencana. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang mengindikasikan adanya kesenjangan capaian (performance gap) yang layak mendapat perhatian lebih lanjut. Beberapa indikator menunjukkan keberhasilan penuh, seperti:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 mencapai 92,54 dari target 92,67 (rasio 99,86%);
- Nilai IKPP Kecamatan tercapai tahun 2021 8,20 dari target 7,99 (rasio 102,63%);
- Nilai IKM Kecamatan tercapai tahun 2022 96,82 dari target 94,84 (rasio 108%);
- Nilai IPP Kecamatan tahun 2023 3,31 dari target 3,60 (rasio 91,94%);
- Nilai PATEN Kecamatan tercapai tahun 2022 86,31 dari target 83,25 (rasio 103,68%);
- Nilai AKIP Kecamatan di 2023 sebesar 72,51 dari target 72,10 (rasio 102,10%);
- Nilai IKM Kecamatan tercapai tahun 2023 99,57 dari target 89,75 (rasio 110,94%);
- Nilai PATEN Kecamatan tercapai tahun 2023 88,81 dari target 81 (rasio 109,64%);
- Nilai AKIP Kecamatan di 2024 sebesar 72,97 dari target 73 (rasio 99,95%);
- Nilai IKPP Kecamatan tercapai tahun 2024 8,76 dari target 8,11 (rasio 108,01%);
- Nilai PATEN Kecamatan tercapai tahun 2024 86,09 dari target 88,90 (rasio 97,7%).

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari beberapa faktor utama:

1. Stabilitas struktur organisasi dan tata kelola internal yang telah berjalan dengan SOP yang baku, serta dukungan mekanisme kerja yang terintegrasi melalui SIPD.
2. Kepemimpinan strategis yang mendorong budaya kerja berbasis hasil (performance-based).
3. Koordinasi kelembagaan yang solid, terutama dalam pelaksanaan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), yang terbukti dari indikator sinergitas dan tindak lanjut rekomendasi yang selalu mencapai 100%.
4. Tersedianya alokasi anggaran operasional yang mendukung keberlangsungan kegiatan pelayanan, termasuk logistik perkantoran dan kendaraan dinas.

Meski secara umum pencapaian indikator kinerja tinggi, terdapat beberapa indikator prioritas yang belum mencapai target maksimal. Satu indikator utama yang menunjukkan kesenjangan yaitu indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2023 target 3,60 hanya tercapai 3,31 (rasio 91,94%). Kesenjangan capaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

- Kurangnya integrasi sistem evaluasi kinerja secara real-time dan pelaporan hasil kerja berbasis outcome.
- Tantangan transformasi digital yang masih berlangsung, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik yang belum optimal.
- Kapasitas SDM yang belum merata dalam penguasaan sistem informasi dan pendekatan pelayanan berbasis kebutuhan pengguna (user-centric service).
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kabuh**  
**Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	77.502.189	N/A	N/A	N/A	N/A	77.502.189	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	77.502.189	N/A	N/A	N/A	N/A	77.502.189	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembangunan gedung kantor / bangunan pendukungnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	N/A	102.309.000	N/A	59.570.000	N/A	N/A	102.309.000	N/A	59.570.000	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	N/A	27.045.00	N/A	N/A	210.261.813	N/A	27.045.000	N/A	N/A	210.261.813	N/A	100	N/A	N/A	99.76	N/A	N/A
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	N/A	2.400.000	N/A	2.680.00	6.700.000	N/A	2.400.000	N/A	2.680.000	6.700.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	10.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	10.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
<b>Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD</b>	<b>N/A</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>N/A</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan rencana strategis SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan laporan keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Program Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan</b>	<b>N/A</b>	N/A	N/A	N/A	4.340.000	<b>N/A</b>	N/A	N/A	N/A	4.340.000	<b>N/A</b>	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	10.013.400	12.565.000	N/A	N/A	N/A	10.013.400	12.565.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	N/A	N/A	N/A	51.549.000	55.073.000	N/A	N/A	N/A	51.549.000	55.073.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b>	N/A	3.137.132.453	N/A	2.461.396.746	2.654.492.154	N/A	3.137.132.453	N/A	2.462.396.746	2.654.492.154	N/A	100	N/A	86,45	96,41	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	8.087.500	N/A	2.429.150	4.208.500	N/A	8.087.500	N/A	2.429.150	4.208.500	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	4.387.500	N/A	1.490.400	3.858.500	N/A	4.387.500	N/A	1.490.400	3.858.500	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	3.700.000	N/A	938.750	350.000	N/A	3.700.000	N/A	938.750	350.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	2.642.379.033	N/A	1.900.567.332	1.931.135.457	N/A	2.642.379.033	N/A	1.900.067.332	1,931.135.457	N/A	100	N/A	83,54	96,27	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	2.64.379.033	N/A	1.827.809.632	1.854.189.757	N/A	2.64.379.033	N/A	1.827.809.632	1.854.189.757	N/A	100	N/A	83	96.12	N/A	N/A
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	71.598.000	76.530.000	N/A	N/A	N/A	71.598.000	76.530.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	1.159.700	415.700	N/A	N/A	N/A	1.159.700	415.700	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	10.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	10.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	10.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	10.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	111.768.500	N/A	77.502.189	86.196.023	N/A	111.768.500	N/A	77.502.189	86.196.023	N/A	100	N/A	91,77	86,76	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	14.551.000	N/A	18.027.425	20.000.400	N/A	14.551.000	N/A	18.027.425	20.000.400	N/A	100	N/A	99,99	100	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	83.317.500	N/A	33.190.000	31.300.000	N/A	83.317.500	N/A	33.190.000	31.300.000	N/A	100	N/A	83,81	71,31	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	3.000.000	N/A	5.129.750	5.260.000	N/A	3.000.000	N/A	5.129.750	5.260.000	N/A	100	N/A	100	99,91	N/A	N/A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	1.860.000	N/A	1.800.000	1.800.000	N/A	1.860.000	N/A	1.800.000	1.800.000	N/A	100	N/A	81,08	76,54	N/A	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	6.000.000	N/A	15.321.914	23.371.000	N/A	6.000.000	N/A	15.321.914	23.371.000	N/A	100	N/A	99,24	99,96	N/A	N/A
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	2.040.000	N/A	4.123.100	4.473.000	N/A	2.040.000	N/A	4.123.100	4.473.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	102.309.000	N/A	59,672,615	130.789.485	N/A	102.309.000	N/A	59,672,615	130.789.485	N/A	100	N/A	99,79	99,30	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	102.309.000	N/A	95.917.300	59.570.000	N/A	102.309.000	N/A	95.917.300	59.570.000	N/A	100	N/A	99,79	99,83	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	128.242.920	N/A	117.498.555	130.786.485	N/A	128.242.920	N/A	117.498.555	130.786.485	N/A	100	N/A	99,21	93,96	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	18.882.420	N/A	30.774.332	48.083.239	N/A	18.882.420	N/A	30.774.332	48.083.239	N/A	100	N/A	98,25	91,07	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	109.210.500	N/A	86.724.233	82.703.246	N/A	109.210.500	N/A	86.724.233	82.703.246	N/A	100	N/A	99,55	95,72	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	150.000	N/A	N/A	N/A	N/A	150.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	70.137.000	N/A	267.482.220	261.847.340	N/A	70.137.000	N/A	267.482.220	261.847.340	N/A	100	N/A	98,82	99,12	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	40.692.000	N/A	29.217.800	44.847.340	N/A	40.692.000	N/A	29.217.800	44.847.340	N/A	100	N/A	92,67	94,87	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	27.045.000	N/A	N/A	210.261.813	N/A	27.045.000	N/A	N/A	210.261.813	N/A	100	N/A	N/A	99,76	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	2.400.000	N/A	2.680.000	6.700.000	N/A	2.400.000	N/A	2.680.000	6.700.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Program:</b> <b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	N/A	7.037.500	N/A	4.641.350	4.340.000	N/A	7.037.500	N/A	4.641.350	4.340.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Kegiatan :</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	7.037.500	N/A	4.641.350	4.340.000	N/A	7.037.500	N/A	4.641.350	4.340.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	7.037.500	N/A	4.641.350	4.340.000	N/A	7.037.500	N/A	4.641.350	4.340.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Program:</b> <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	N/A	N/A	N/A	24.833.000	71.058.000	N/A	N/A	N/A	24.833.000	71.058.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	24.833.000	71.058.000	N/A	N/A	N/A	24.833.000	71.058.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan:</b> Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Program:</b> <b>Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	N/A	7.994.000	N/A	10.013.400	12.565.000	N/A	7.994.000	N/A	10.013.400	12.565.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	7.994.000	N/A	10.013.400	12.565.000	N/A	7.994.000	N/A	10.013.400	12.565.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Sub Kegiatan:</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	7.994.000	N/A	10.013.400	12.565.000	N/A	7.994.000	N/A	10.013.400	12.565.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Program:</b> <b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	N/A	14.719.000	N/A	22.175.000	27.550.000	N/A	14.719.000	N/A	22.175.000	27.550.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Kegiatan :</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	14.719.000	N/A	22.175.000	27.550.000	N/A	14.719.000	N/A	22.175.000	27.550.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	14.719.000	N/A	22.175.000	27.550.000	N/A	14.719.000	N/A	22.175.000	27.550.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	N/A	29.489.000	N/A	51.549.000	55.073.000	N/A	29.489.000	N/A	51.549.000	55.073.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	N/A	29.489.000	N/A	51.549.000	55.073.000	N/A	29.489.000	N/A	51.549.000	55.073.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>	N/A	29.498.000	N/A	51.549.000	15.821.000	N/A	29.498.000	N/A	51.549.000	15.821.000	N/A	100	N/A	100	100	N/A	N/A
<b>Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/kota</b>	N/A	N/A	N/A	2.874.173.48 1	2.583.680.65 4	N/A	N/A	N/A	2.874.173.48 1	2.583.680.65 54	N/A	N/A	N/A	86,45	96,1	N/A	N/A
<b>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	N/A	N/A	N/A	2.429.150	N/A	N/A	N/A	N/A	2.429.150	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	1.490.400	N/A	N/A	N/A	N/A	1.490.400	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	938.750	N/A	N/A	N/A	N/A	938.750	N/A	N/A	N/A	N/A	99,83	N/A	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	2.275.061.767	1.931.135.457	N/A	N/A	N/A	2.275.061.767	1.931.135.457	N/A	N/A	N/A	83,54	96,27	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	2.202.304.067	1.854.189.757	N/A	N/A	N/A	2.202.304.067	1.854.189.757	N/A	N/A	N/A	83	96,12	N/A	N/A
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	71.598.000	76.530.000	N/A	N/A	N/A	71.598.000	76.530.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	1.159.700	415.700	N/A	N/A	N/A	1.159.700	415.700	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	10.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	10.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	10.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	10.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	84.450.050	86.196.023	N/A	N/A	N/A	84.450.050	86.196.023	N/A	N/A	N/A	91,77	86,76	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	N/A	18.029.000	20.000.400	N/A	N/A	N/A	18.027.425	20.000.400	N/A	N/A	N/A	99,99	100	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	N/A	39.600.000	31.300.000	N/A	N/A	N/A	33.190.000	31.300.000	N/A	N/A	N/A	83,81	100	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	N/A	5.129.950	5.260.000	N/A	N/A	N/A	5.129.950	5.260.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	N/A	N/A	N/A	2.220.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	81,08	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	15.348.000	N/A	N/A	N/A	N/A	15.231.914	N/A	N/A	N/A	N/A	99,24	N/A	N/A	N/A
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	N/A	4.123.100	N/A	N/A	N/A	N/A	4.123.100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	96.120.900	N/A	N/A	N/A	N/A	95.917.300	N/A	N/A	N/A	N/A	99,79	N/A	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	96.120.900	N/A	N/A	N/A	N/A	95.917.300	N/A	N/A	N/A	N/A	99,79	N/A	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Aset Tetap Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	118.440.014	N/A	N/A	N/A	N/A	117.498.555	N/A	N/A	N/A	N/A	99,21	N/A	N/A	N/A
<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	N/A	31.322.814	N/A	N/A	N/A	N/A	30.774.322	N/A	N/A	N/A	N/A	98,25	N/A	N/A	N/A
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	N/A	87.117.100	N/A	N/A	N/A	N/A	86.724.233	N/A	N/A	N/A	N/A	99,55	N/A	N/A	N/A
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	270.671.600	N/A	N/A	N/A	N/A	267.482.220	N/A	N/A	N/A	N/A	98,82	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	N/A	31.530.000	N/A	N/A	N/A	N/A	29.217.800	N/A	N/A	N/A	N/A	92,67	N/A	N/A	N/A
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	236.461.600	N/A	N/A	N/A	N/A	235.584.420	N/A	N/A	N/A	N/A	99,63	N/A	N/A	N/A
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	2.680.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.680.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
<b>Program:</b> <b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	N/A	N/A	N/A	4.641.350	N/A	N/A	N/A	N/A	4.641.350	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	4.641.350	N/A	N/A	N/A	N/A	4.641.350	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	4.641.350	N/A	N/A	N/A	N/A	4.641.350	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
<b>Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	N/A	N/A	N/A	24.833.000	N/A	N/A	N/A	N/A	24.833.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	24.833.000	N/A	N/A	N/A	N/A	24.833.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	24.833.000	N/A	N/A	N/A	N/A	24.833.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	N/A	N/A	N/A	10.013.400	N/A	N/A	N/A	N/A	10.013.400	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	10.013.400	N/A	N/A	N/A	N/A	10.013.400	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	N/A	10.013.400	N/A	N/A	N/A	N/A	10.013.400	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	N/A	N/A	N/A	22.175.000	N/A	N/A	N/A	N/A	22.175.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	22.175.000	N/A	N/A	N/A	N/A	22.175.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	22.175.000	N/A	N/A	N/A	N/A	22.175.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
<b>Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	N/A	N/A	N/A	51.549.000	N/A	N/A	N/A	N/A	51.549.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	N/A	51.549.000	N/A	N/A	N/A	N/A	51.549.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	51.549.000	N/A	N/A	N/A	N/A	51.549.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
<b>Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>2.529.099.054</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>2.483.905.654</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>98,21%</b>	N/A	N/A
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>4.208.500</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>4.208.500</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	N/A	N/A
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>3.858.500</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>3.858.500</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	N/A	N/A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>350.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>350.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100,00%</b>	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>2.005.931.457</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>1.931.135.457</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>96,27%</b>	N/A	N/A
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>1.928.985.757</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>1.854.189.757</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>96,12%</b>	N/A	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>415.700</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>415.700</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100,00%</b>	N/A	N/A
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>76.530.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>76.530.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100,00%</b>	N/A	N/A
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>10.200.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>10.200.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	N/A	N/A
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>10.200.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>10.200.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	N/A	N/A
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>99.347.300</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>86.196.023</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>86,76%</b>	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>4.473.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>4.473.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100,00%</b>	N/A	N/A
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>20.000.900</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>20.000.400</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>99,99%</b>	N/A	N/A
Penyediaan bahan logistik kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>43.890.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>31.300.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>71,31%</b>	N/A	N/A
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>5.260.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>5.260.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100,00%</b>	N/A	N/A
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>2.352.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>1.800.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>76,53%</b>	N/A	N/A
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>23.371.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>23.371.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	N/A	N/A
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>59.672.615</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>59.570.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>99,83%</b>	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>59.672.615</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>59.570.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>99,83%</b>	N/A	N/A
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>N/A</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>N/A</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>N/A</b>	N/A	N/A
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>139.200.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>130.786.485</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>93,96%</b>	N/A	N/A
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>52.800.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>48.083.239</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>91,07%</b>	N/A	N/A
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>86.400.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>82.703.246</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>95,72%</b>	N/A	N/A
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>264.120.547</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>261.809.153</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>99,12%</b>	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>46.655.297</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>44.847.340</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>96,12%</b>	N/A	N/A
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>6.700.00</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>6.700.00</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100,00%</b>	N/A	N/A
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>210.765.250</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>210.261.813</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>99,76%</b>	N/A	N/A
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>4.340.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>4.340.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	N/A	N/A
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>4.340.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>4.340.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	4.340.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.340.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	71,058.000	N/A	N/A	N/A	N/A	71,058.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	71,058.000	N/A	N/A	N/A	N/A	71,058.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	N/A	24.878.000	N/A	N/A	N/A	N/A	24.878.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	46.180.000	N/A	N/A	N/A	N/A	46.180.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	12.565.000	N/A	N/A	N/A	N/A	12.565.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	12.565.000	N/A	N/A	N/A	N/A	12.565.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	N/A	N/A	12.565.000	N/A	N/A	N/A	N/A	12.565.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>27.550.000</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>27.550.000</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	27.550.000	N/A	N/A	N/A	N/A	27.550.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	27.550.000	N/A	N/A	N/A	N/A	27.550.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>55.073.000</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>55.073.000</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	55.073.000	N/A	N/A	N/A	N/A	55.073.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>39.252.500</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>39.252.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>99,99%</b>	N/A	N/A
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>15.821.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>15.821.000</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	N/A	N/A

Berdasarkan tabel 2.7 evaluasi terhadap rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan pendanaan pelayanan di Kecamatan Kabuh pada beberapa tahun terakhir tergolong baik. Hal ini tercermin dari rasio realisasi terhadap anggaran yang mendekati atau mencapai 100% di berbagai program dan sub kegiatan, baik pada tahun anggaran 2020, 2022, 2023 maupun 2024.

Pada tahun 2023 misalnya, beberapa program menunjukkan rasio realisasi yang sangat tinggi, bahkan mendekati sempurna. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan semua mencapai rasio 90% hingga 100%, dengan rata-rata 94,28%. Hal ini menandakan bahwa perencanaan keuangan pada tahun tersebut disusun secara realistis dan diikuti oleh pelaksanaan kegiatan yang disiplin dan tepat sasaran.

Hal yang serupa juga dapat dilihat pada tahun 2024, di mana sebagian besar program mencatatkan rasio realisasi anggaran antara 85% hingga 100%, seperti pada penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (100%), administrasi kepegawaian perangkat daerah (100%), administrasi umum perangkat daerah (86,76%), pengadaan barang milik daerah (99,30%), penyediaan jasa penunjang (93,96%), dan pemeliharaan barang milik daerah (99,12%).

Kinerja ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran dan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara terintegrasi dan terkendali, menunjukkan kedewasaan manajerial dalam pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tahun dan sub kegiatan yang menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang kurang optimal, khususnya pada tahun 2021 dan 2022. Misalnya, pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat di tahun 2022, terdapat pertumbuhan anggaran yang cenderung menurun pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Fenomena ini secara kuat berkaitan dengan dampak sistemik pandemi COVID-19 yang terjadi secara nasional selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2021 dan sebagian besar tahun 2022, pemerintah daerah di seluruh

Indonesia termasuk Kabupaten Jombang menghadapi kebijakan refocusing anggaran, yaitu pemotongan dan pengalihan anggaran belanja rutin dan pembangunan ke dalam pos-pos darurat seperti belanja kesehatan, bantuan sosial, penanganan dampak ekonomi, dan penguatan ketahanan pangan. Akibatnya, banyak kegiatan perangkat daerah yang ditunda, dipangkas, atau bahkan dibatalkan, terutama yang bersifat administratif, seremonial, pengadaan fisik ringan, dan kegiatan tatap muka seperti rapat koordinasi atau bimtek.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme Penganggaran

Perangkat Daerah yang memiliki mekanisme perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kebutuhan riil di lapangan cenderung mampu mencapai realisasi anggaran yang tinggi. Proses SIPD yang terstandar juga mendukung transparansi dan integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Jumlah dan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)

Unit kerja yang memiliki staf keuangan dan perencana yang kompeten cenderung mampu menyusun perencanaan anggaran yang presisi, menyusun DPA dengan baik, serta melakukan pelaporan yang tertib. Sebaliknya, sub kegiatan yang berada di bawah kendali unit kerja yang kekurangan SDM atau memiliki beban kerja tinggi berisiko mengalami keterlambatan dan ketidaksesuaian realisasi anggaran.

3. Kesesuaian antara Progres Fisik dan Keuangan

Dalam banyak kasus, pelaksanaan kegiatan secara fisik yang terlambat juga akan menyebabkan serapan anggaran rendah. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, baik karena faktor eksternal seperti vendor, maupun internal seperti proses administrasi, akan menyebabkan belanja tidak terserap secara optimal.

4. Kebijakan Refocusing dan Perubahan Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat kebijakan penyesuaian anggaran karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengurangan kegiatan nonprioritas. Ini dapat menjelaskan mengapa pada tahun-tahun tersebut banyak program dengan rasio realisasi yang sangat rendah.

5. Tingkat Prioritas Program

Kegiatan yang sifatnya rutin dan langsung mendukung pelayanan publik seperti gaji ASN, logistik perkantoran, hingga kegiatan koordinasi Forkopimcam cenderung mendapatkan realisasi tinggi. Sebaliknya, kegiatan yang bersifat administratif atau tambahan sering kali menjadi objek efisiensi.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Kabuh mencerminkan keberagaman aktor yang secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan. Kelompok ini secara garis besar terdiri dari pemerintah desa, masyarakat umum, dan lembaga/instansi kewilayahan, yang masing-masing memiliki karakteristik kebutuhan layanan yang berbeda-beda, namun saling berkaitan dalam kerangka pelayanan publik dan tata kelola wilayah.

Pemerintah desa merupakan kelompok sasaran utama dan strategis dari layanan Kecamatan. Hal ini disebabkan karena kecamatan memiliki mandat sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks ini, Kecamatan Kabuh memberikan pelayanan berupa fasilitasi perencanaan pembangunan desa, penilaian dan pengesahan dokumen peraturan desa, pendampingan pelaksanaan musyawarah desa, pembinaan kelembagaan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa. Selain itu, kecamatan juga berperan sebagai penghubung antara desa dengan perangkat daerah teknis di kabupaten, misalnya dalam fasilitasi program Dana Desa, bantuan keuangan khusus, maupun intervensi program nasional.

Masyarakat umum merupakan penerima langsung dari berbagai bentuk layanan publik yang diselenggarakan kecamatan, baik yang bersifat administratif maupun fasilitatif. Melalui unit Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), masyarakat memperoleh layanan dokumen kependudukan seperti surat pindah, pengantar KTP, kartu keluarga, legalisasi dokumen, serta surat keterangan umum yang dibutuhkan dalam urusan sosial dan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga menjadi sasaran kegiatan fasilitasi pembangunan kewilayahan seperti sosialisasi ketertiban umum, penyuluhan hukum, penyampaian informasi kebijakan daerah, serta penanganan konflik sosial. Kecamatan juga

berperan sebagai ruang aspirasi dan aduan masyarakat atas dinamika pelayanan publik maupun kehidupan sosial di desa.

Lembaga atau instansi kewilayahan, seperti TNI/Polri, Koramil, Polsek, Puskesmas, KUA, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, juga menjadi kelompok sasaran layanan Kecamatan dalam konteks koordinasi lintas sektor. Kecamatan Kabuh melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) berperan memfasilitasi sinergi lintas kelembagaan untuk menciptakan ketertiban umum, penanganan kejadian bencana, peringatan dini konflik, serta dukungan operasional pelaksanaan program sektoral di wilayah kecamatan. Kehadiran lembaga-lembaga ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan efektivitas pelayanan lintas bidang, sehingga koordinasi reguler dan fasilitasi kerja sama menjadi bagian dari fungsi pelayanan Kecamatan yang menysasar kelompok ini.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kabuh Tahun 2025–2029, dilakukan penelaahan dan analisis terhadap dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program pelayanan Kecamatan Kabuh selaras dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan daerah kabupaten secara keseluruhan.

Penelaahan terhadap dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa dalam periode 2025–2029, Kemendagri mengarahkan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, efisien, dan berbasis data. Fokus utamanya meliputi: penguatan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas pemerintahan kewilayahan (termasuk kecamatan), serta penguatan reformasi birokrasi dan manajemen kinerja berbasis outcome. Dalam konteks ini, Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berada pada level paling dekat

dengan masyarakat diarahkan untuk menjadi garda terdepan pelayanan yang cepat, sederhana, dan menjangkau hingga tingkat desa.

Lebih lanjut, dalam Renstra Kementerian Desa PDTT, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan fasilitasi pembangunan berbasis potensi lokal. Bagi Kecamatan Kabuh, arah kebijakan ini relevan karena peran Kecamatan sangat erat dalam hal pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa dan sinergi program pembangunan antara desa dan kabupaten.

Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, khususnya Bappeda, Dinas PMD, Disdukcapil, dan Satpol PP, menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan mandat dan fungsi pelayanan Kecamatan Kabuh. Bappeda Kabupaten Jombang mengarahkan perangkat daerah untuk berorientasi pada penguatan sistem perencanaan yang partisipatif dan berbasis data wilayah. Kecamatan sebagai unit yang menjangkau langsung desa-desa menjadi pelaksana utama dalam pengumpulan data perencanaan, validasi usulan masyarakat, serta fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan.

Sementara itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang memprioritaskan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, percepatan pelayanan publik berbasis teknologi, serta peningkatan kualitas koordinasi antarwilayah. Fungsi ini selaras dengan tugas Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa, sehingga menjadi dasar kuat bagi Kecamatan Kabuh untuk mengembangkan layanan pembinaan kelembagaan desa, pelatihan pemerintahan, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan antardesa.

Dalam Renstra Disdukcapil, fokus layanan

diarahkan pada percepatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dan integrasi data kependudukan daerah. Kecamatan Kabuh, yang menjalankan pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), menjadi perpanjangan tangan kabupaten dalam pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas layanan PATEN menjadi agenda penting dalam Renstra Kecamatan.

Kemudian dari sisi ketentraman dan ketertiban, Renstra Satpol PP menggaris bawahi pentingnya peran kecamatan dalam menjaga ketertiban umum, deteksi dini konflik sosial, serta koordinasi keamanan lingkungan bersama Forkopimcam. Hal ini memperkuat posisi Kecamatan Kabuh sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan TNI/Polri, tokoh masyarakat, dan perangkat desa dalam membangun stabilitas sosial di tingkat wilayah.

Dari keseluruhan hasil telaahan terhadap dokumen Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten Jombang tersebut, diperoleh gambaran bahwa tantangan pelayanan Kecamatan Kabuh ke depan akan semakin kompleks. Kecamatan tidak lagi hanya sebagai penghubung administrasi antara desa dan kabupaten, melainkan juga dituntut menjadi penggerak layanan berbasis masyarakat, fasilitator reformasi birokrasi di lini depan, dan koordinator pembangunan kewilayahan. Peluang besar juga terbuka, antara lain melalui:

- Dukungan terhadap program digitalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan,
- Konektivitas dengan sistem informasi kependudukan daerah,
- Integrasi program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dan kegiatan lintas sektor,
- Perluasan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah kecamatan.

Dengan memahami arah kebijakan dan prioritas dari Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten Jombang, Kecamatan Kabuh dapat menyusun strategi pelayanan yang lebih responsif, berbasis wilayah, dan selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah secara simultan.

Kecamatan Kabuh berada di bagian utara Kabupaten Jombang dan memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Bojonegoro dan Nganjuk.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041, Kecamatan Kabuh merupakan salah satu kawasan strategis yang diarahkan sebagai :

1. Kawasan Budidaya
  - Pertanian lahan basah dan lahan kering menjadi fungsi utama, mengingat sebagian besar wilayah Kecamatan Kabuh merupakan sawah dan tegalan.
  - Terdapat dukungan untuk pengembangan hortikultural dan tanaman pangan.
  - Penataan kawasan pemukiman skala kecil di desa-desa.
2. Kawasan Lindung
  - Daerah dengan topografi tinggi serta dekat dengan aliran sungai diarahkan sebagai kawasan lindung sempadan sungai.
  - Upaya konservasi tanah dan air diprioritaskan di beberapa titik yang rawan erosi.
3. Infrastruktur dan Konektivitas
  - Kecamatan Kabuh dilewati jalan provinsi, yang menghubungkan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan.
  - Aksesibilitas antar wilayah masih terbatas, terutama pada musim hujan.
  - Masih terdapat daerah tertinggal yaitu Dusun Ngapus Desa Sumberaji dan Dusun Munungkerep Desa Munungkerep.
  - Kualitas infrastruktur irigasimasih perlu ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pertanian.

4. Potensi ekonomi dan pengembangan wilayah
  - Potensi unggulan adalah sektor pertanian, termasuk hasil bumi dan ternak.
  - Terdapat potensi pengembangan industri kecil rumah tangga dan agrowisata berbasis pedesaan
  - Diperlukan penguatan kelembagaan desa dan petani untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing
5. Dukungan terhadap kebijakan pengembangan wilayah
  - Kecamatan Kabuh mendukung kebijakan pemerataan pembangunan di wilayah utara Jombang yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah selatan.
  - Penguatan fungsi pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan pasar desa) menjadi bagian dari strategi pembangunan.

Sementara itu, hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 menyoroti beberapa isu strategis lingkungan yang memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan kecamatan. Salah satunya peningkatan pengelolaan persampahan dan pencemaran. Isu ini dirumuskan dari integrasi isu strategis masukan stakeholders, yaitu belum optimalnya pengelolaan persampahan dan peningkatan ancaman pencemaran akibat aktivitas domestik, industri dan perkotaan, dengan isu dari capaian TPB Kabupaten Jombang yang terkait dengan kualitas air sungai sebagai sumber air baku yang menurun, termasuk karena pencemaran yang berdampak pada risiko konflik sosial, degradasi sumber daya air, serta ketimpangan akses terhadap layanan dasar di desa-desa yang masuk dalam zona transisi agraris-industri. Di sisi lain, KLHS juga menekankan pentingnya keadilan spasial dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk menjaga kualitas lingkungan dan sosial masyarakat.

Implikasi dari dua dokumen strategis ini terhadap penyusunan Renstra Kecamatan Kabuh menunjukkan bahwa tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah meningkatnya kompleksitas tata kelola kewilayahan, terutama

dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk, layanan kependudukan dan sosial, serta penguatan kapasitas koordinasi antarinstansi. Kecamatan dituntut untuk menyediakan pelayanan yang lebih cepat, adaptif, berbasis data spasial, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan di desa-desa padat dan wilayah perbatasan.

Sebaliknya, terdapat pula peluang strategis yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

- Penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi lintas desa dalam pengendalian pembangunan berbasis ruang,
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan administrasi terpadu (PATEN),
- Pengembangan model pelayanan berbasis komunitas dan partisipatif di desa-desa dengan dinamika sosial tinggi,
- Integrasi program pelayanan dengan agenda ketahanan sosial- lingkungan seperti mitigasi konflik lahan, edukasi lingkungan, dan pengelolaan bencana skala lokal.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, jenis pelayanan yang perlu diperkuat antara lain:

- Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (KTP, KK, dan surat pindah);
- Layanan fasilitasi Pembangunan desa (pengawasan kegiatan fisik, pembinaan BPD, musyawarah desa);
- Pelayanan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban (penanganan konflik sosial, pengawasan hiburan, mediasi masyarakat);
- Koordinasi pembangunan lintas sektor (rapat Forkopimcam, pemantauan kegiatan OPD di wilayah kecamatan); Pelayanan penanganan bencana dan lingkungan (sosialisasi kesiapsiagaan bencana, pemantauan dampak pembangunan).

Adapun perkiraan besaran kebutuhan pelayanan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan permintaan pelayanan publik sebesar 10–15% per tahun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan kawasan permukiman

dan industri. Hal ini terlihat dari tren kenaikan permohonan administrasi kependudukan, jumlah pengaduan masyarakat, dan permintaan fasilitasi pembangunan desa yang dilaporkan dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, arah lokasi pengembangan pelayanan perlu difokuskan pada:

- Wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi, seperti Desa Karangpakis dan Kabuh.
- Wilayah perbatasan yang memiliki akses pelayanan terbatas, seperti Desa Sumberaji, Munungkerep, dan Marmoyo
- Zona pertumbuhan ekonomi baru, di mana dibutuhkan percepatan pelayanan administratif dan koordinasi lintas instansi.

Dengan demikian, melalui telaahan terhadap RTRW dan KLHS, Kecamatan Kabuh dapat menyusun strategi pelayanan yang lebih tepat sasaran, berbasis spasial, dan proaktif terhadap tantangan lingkungan dan sosial yang dinamis. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Kabuh tidak hanya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan wilayah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

#### **2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kabuh tidak bekerja secara mandiri, melainkan menjalin kemitraan yang erat dengan berbagai pihak, baik dari unsur internal pemerintahan daerah, lembaga vertikal, pemerintahan desa, hingga masyarakat sipil. Mitra utama Kecamatan dalam pemberian pelayanan meliputi Perangkat Daerah teknis lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, seperti Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD dan Satpol PP. Kemitraan ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas urusan, seperti fasilitasi perencanaan pembangunan, pembinaan pemerintahan desa, pelayanan administrasi kependudukan, serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum. Peran Bappeda penting dalam mendukung perencanaan berbasis data wilayah, DPMD dan Disdukcapil dalam pembinaan desa dan layanan kependudukan melalui unit PATEN Kecamatan, serta Satpol PP dan BPBD dalam

penanganan gangguan ketertiban dan bencana.

Selain itu, Kecamatan Kabuh juga bermitra dengan lembaga vertikal dan unsur Forkopimcam, antara lain Polsek, Koramil, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Puskesmas. Lembaga- lembaga ini mendukung Kecamatan dalam menjaga stabilitas keamanan, menyelesaikan konflik sosial, melayani kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pembinaan keluarga, serta menjalankan protokol kewilayahan dalam penanganan darurat. Polsek dan Koramil berperan strategis dalam pencegahan gangguan kamtibmas, sedangkan Puskesmas menjadi garda depan layanan kesehatan berbasis masyarakat.

Mitra lainnya adalah seluruh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Kabuh yang terdiri dari 16 desa, berikut Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang menjadi mitra langsung dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kerja sama ini mencakup musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan, fasilitasi pengesahan Perdes, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan desa. Kecamatan juga bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga lokal seperti LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW, serta kelompok pemuda dan keagamaan dalam menyukseskan kegiatan sosial kemasyarakatan dan mendorong partisipasi warga dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, keberhasilan pelayanan publik di Kecamatan Kabuh sangat bergantung pada kekuatan sinergi dan koordinasi dengan para mitra tersebut. Melalui kemitraan yang harmonis, Kecamatan dapat menjalankan fungsinya sebagai simpul koordinasi pemerintahan wilayah yang mampu menjangkau masyarakat secara menyeluruh dan adaptif terhadap dinamika lokal.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Seiring dengan perkembangan kebijakan yang terjadi pada tahun 2016 dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang wajib menyusun dokumen perencanaan melalui proses perencanaan yang memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta *bottom up* dan *top down*.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kabuh selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

**Tabel 2.8**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya kapasitas aparatur desa	Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Minimnya pelatihan, pendampingan, dan pembinaan teknis terkait regulasi dan administrasi desa
2.	Terbatasnya kualitas SDM kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan	Belum optimalnya pengembangan kompetensi aparatur
3.	Kurangnya sarana dan prasarana kerja kecamatan	Belum tepenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kecamatan	Terbatasnya anggaran pengadaan dan pemeliharaan fasilitas
4.	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Kurangnya inovasi layanan, keterbatasan SDM pelayanan, dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi
5.	Belum terintegrasinya sistem informasi wilayah	Belum ada sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa	Belum tersedia platform data bersama, kurangnya infrastruktur jaringan dan belum ada kebijakan integrasi sistem
6.	Lemahnya pemberdayaan kelembagaan desa	Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya	Minimnya peran kecamatan dalam pendampingan kelembagaan desa dan belum ada sinergi program pemberdayaan lintas sektor

## 2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Kabuh merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang menjalankan tugas atas pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum dari Bupati. Tugas tersebut mencakup pelayanan publik, administratif, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan lintas sektor, fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2029, tugas tersebut sangat relevan dengan visi daerah: ***"Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua"***.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Kecamatan Kabuh secara spesifik dan dominan berkontribusi terhadap Misi ke-5, ***"Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif"***.

Pelaksanaan Misi ke-5 tercermin dalam pelaksanaan tugas Kecamatan seperti:

- Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diarahkan menjadi layanan publik yang akuntabel, cepat, dan transparan.
- Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan (Musrenbang), sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif dan akuntabel.
- Pelaksanaan fungsi koordinasi antarinstansi kewilayahan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), untuk menjaga sinergi program dan respons terhadap isu-isu wilayah.
- Penguatan kapasitas pemerintahan desa melalui pembinaan regulatif, pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan desa (BPD, LPM, RT/RW).
- Penyebarluasan informasi publik dan fasilitasi aspirasi

masyarakat sebagai bagian dari implementasi pemerintahan yang terbuka.

Dengan kata lain, Kecamatan Kabuh memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat hadir hingga ke level paling bawah, yaitu desa dan masyarakat. Peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan kewilayahan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kepala daerah untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, adaptif, dan partisipatif.

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, yaitu **“Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif”**, terdapat sejumlah faktor pendorong dan penghambat yang secara langsung mempengaruhi kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kabuh. Faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam mengidentifikasi tantangan dan potensi strategis dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan koordinasi kewilayahan ke depan.

#### 1. Faktor Pendorong

- Tersedianya program pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas aparatur dari perangkat daerah teknis (BKPSDM, DPMD).
- Kesadaran pemerintah daerah untuk mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan desa.
- Potensi ekonomi desa yang beragam dan dapat dikembangkan secara kolaboratif oleh lembaga desa.
- Dukungan dari unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan terhadap kegiatan pembinaan ideologi dan bela negara.

#### 2. Faktor Penghambat

Belum meratanya akses terhadap pelatihan atau bimbingan teknis yang bersifat praktis dan berkelanjutan.

- Masih terdapat fasilitas pelayanan di kecamatan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal, seperti jaringan internet, ruang pelayanan ramah disabilitas

dan perlengkapan digital.

- Masih rendahnya kapasitas manajerial dan kewirausahaan pengelola BUMDesa/BUMDesma.
- Menurunnya tingkat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan berbasis nilai kebangsaan.
- 

### **2.2.3 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021– 2041, Kecamatan Kabuh merupakan salah satu kawasan strategis yang diarahkan sebagai kawasan penyangga pertanian sekaligus kawasan lindung konservasi tanah dan air. Kecamatan ini dilalui jaringan jalan provinsi yang menghubungkan kawasan produksi pertanian Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan. Hal ini menjadikan Kecamatan Kabuh memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah khususnya yang berbasis agribisnis, UMKM, dan pelayanan dasar. Selain itu, pola ruang dalam RTRW juga mengidentifikasi sejumlah desa di Kabuh sebagai wilayah yang masih tertinggal dan perlu perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi pertanian. Sementara itu, dari telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025– 2029, menyoroti tantangan seperti penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi pencemaran air tanah, dan ketimpangan dalam akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Di sisi lain, wilayah ini juga memiliki potensi dalam pengembangan pendekatan pembangunan berkelanjutan melalui edukasi masyarakat, penguatan kapasitas desa dalam mitigasi risiko lingkungan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengendalian dampak lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan pelayanan publik di Kecamatan Kabuh perlu mempertimbangkan konteks ekologis dan kerentanan lingkungan, agar pelayanan yang diberikan tidak hanya merata, tetapi juga berkelanjutan secara spasial dan sosial.

Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah:

### **1. Faktor Pendorong**

- Adanya penetapan Kecamatan Kabuh sebagai kawasan penyangga pertanian pada RT/RW Kabupaten Jombang.
- Ketersediaan infrastruktur dasar wilayah (jalan utama, konektivitas antardesa) yang mendukung akses dan distribusi pelayanan publik.
- Arahan penggunaan ruang yang jelas dalam RT/RW, sehingga mempermudah penentuan prioritas lokasi pelayanan dan penataan wilayah.
- Dukungan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam KLHS, yang mendorong pelayanan berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi risiko.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, membuka peluang partisipasi dalam layanan berbasis edukasi lingkungan.
- Potensi penguatan kolaborasi antar-instansi wilayah (kecamatan, desa, OPD teknis, masyarakat) dalam pemantauan ruang dan kualitas lingkungan.

### **2. Faktor Penghambat**

- Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang aktual, terutama akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman/industri.
- Tingginya tekanan lingkungan seperti pencemaran air, penurunan kualitas tanah, dan konversi lahan produktif di desa-desa padat aktivitas.
- Keterbatasan fasilitas pelayanan dasar lingkungan, seperti sanitasi, pengelolaan air bersih, dan sistem drainase, terutama di zona pertumbuhan baru.
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan desa dan kecamatan dalam pemantauan dampak pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Minimnya integrasi data spasial dan ekologis dalam

perencanaan pelayanan publik, yang menyulitkan alokasi layanan berbasis risiko dan kebutuhan aktual.

- Kurangnya sistem pengawasan dan penegakan aturan tata ruang di tingkat lokal, yang melemahkan efektivitas pelayanan berbasis tata ruang berkelanjutan.

### **3. Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun isu eksternal. Isu internal permasalahan pembangunan yang telah teridentifikasi sebelumnya merupakan isu dari hasil evaluasi kinerja atau Gambaran Umum Kondisi Kecamatan Kabuh pada periode sebelumnya (2018-2023). Isu strategis Kecamatan Kabuh adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Tehnik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia				Perlunya peningkatan kualitas SDM di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan					
	belum tepenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kecamatan		Kemiskinan dan Stunting		Kemiskinan perdesaan	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.					
	Belum ada sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana Fungsinya		Kemiskinan dan Stunting	Kurang berkembangnya BUMDesa dan BUMDesma	Kemiskinan perdesaan	Peran BUMDesa, BUMDesma, Lembaga dan pemberdayaan desa/kelurahan belum optimal dalam pembangunan desa
					1. Penguatan wawasan kebangsaan 2. Berkembangnya intoleransi	Penguatan wawasan kebangsaan

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, inklusif, dan berbasis kinerja, Kecamatan Kabuh menetapkan tujuan strategis yang selaras dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Tujuan tersebut secara khusus mendukung pencapaian salah satu **sasaran pembangunan daerah**, yakni: ***“Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.”*** Tujuan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Kabuh. Pelayanan publik yang berkualitas menuntut keterpaduan tata kelola, kemampuan aparatur yang mumpuni, serta prosedur layanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, tujuan yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Kabuh adalah: ***“Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan.”*** Tujuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan harus ditingkatkan mulai dari proses perencanaan, pelayanan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan desa, pelaporan sampai dengan penanganan isu-isu strategis kewilayahan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan memerlukan kerja sama yang erat antara seluruh pemangku kepentingan di tingkat wilayah, termasuk pemerintah desa, unsur Forkopimcam, lembaga masyarakat, dan perangkat daerah teknis lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Kecamatan Kabuh juga berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. NSPK menjadi instrumen penting yang memastikan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai dengan kerangka hukum nasional, menjamin keseragaman mutu, dan dapat dievaluasi secara sistemik oleh pemerintah di atasnya. Melalui penerapan NSPK, kecamatan menjalankan fungsinya dalam lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan dengan standar yang dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sinergitas kecamatan yang berpedoman pada NSPK merupakan fondasi utama dalam mendukung visi dan misi kepala daerah, serta menjadi perwujudan nyata dari kehadiran negara

dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Kedepannya, Kecamatan Kabuh diharapkan mampu mengembangkan model pelayanan yang lebih adaptif, berbasis digital, partisipatif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

### 3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Kecamatan Kabuh sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati menetapkan arah pembangunan lima tahunan melalui tujuan dan sasaran yang terukur serta relevan dengan konteks kewilayahan. Tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Kabuh pada periode 2025–2029 adalah ***meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***. Tujuan ini mencerminkan upaya strategis untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga inklusif, mudah dijangkau, serta diselenggarakan secara terpadu antar pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas tidak dapat diwujudkan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antar unsur pemerintahan di tingkat kecamatan, termasuk dengan pemerintah desa, Forkopimcam, organisasi kemasyarakatan, serta perangkat daerah teknis di kabupaten. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, Kecamatan Kabuh menetapkan dua sasaran strategis.

Sasaran pertama adalah ***meningkatkan kualitas pelayanan publik***. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan Masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Kualitas pelayanan publik di sini juga mengandung makna efektivitas kinerja kecamatan dalam mendukung kelancaran administrasi kependudukan, sinergi lintas sektor, fasilitasi penyusunan perencanaan desa, koordinasi musyawarah pembangunan, pembinaan kelembagaan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, serta penanganan persoalan lintas wilayah secara responsif.

Sasaran kedua adalah ***Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif***. Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui perubahan dalam struktur, prosedur, budaya kerja, dan reformasi birokrasi. Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan melalui penguatan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis sistem informasi.

Dalam pelaksanaan kedua sasaran tersebut, Kecamatan Kabuh senantiasa mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman teknis agar pelayanan yang

diberikan sejalan dengan kebijakan nasional, terukur secara objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan secara jelas dan terarah ini, Kecamatan Kabuh diharapkan mampu meningkatkan peran strategisnya sebagai penyedia layanan terdepan dan simpul koordinasi pemerintahan di tingkat kewilayahan, yang mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu. Tehnik perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tehnik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Kabuh</b>											
- Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	-	75	75,4	75,7	75,9	76,3	76,5	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,76	8,80	8,81	8,82	8,83	8,84	8,85	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66,39	70	71	72	73	74	75	

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah /upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dalam konteks pengembangan daerah sesuai dengan pentahapan pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2026-2030, fokus strategi Kecamatan Kabuh diarahkan pada **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif**. Strategi ini bertumpu pada peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan

pelayanan, serta pengembangan sistem administrasi dan pengawasan yang berbasis digital dan partisipatif.

Untuk mendukung implementasi strategi dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra secara bertahap, disusunlah penahapan pembangunan tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan masing-masing tahun selama periode 2025–2029. Penahapan ini memberikan gambaran fokus capaian tahunan Perangkat Daerah, baik dalam konteks peningkatan kinerja pelayanan, penguatan kelembagaan, maupun dukungan terhadap kebijakan prioritas daerah. Penahapan dilakukan secara bertingkat dan logis, dimulai dari fondasi penguatan sistem dan kapasitas internal, lalu dilanjutkan dengan ekspansi pelaksanaan kegiatan dan penguatan pengaruh eksternal kecamatan dalam koordinasi kewilayahan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pentahapan Renstra PD**

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana prasarana dan sistem pelayanan administratif.	Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat desa peningkatan kualitas partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.	Penguatan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui optimalisasi peran dan koordinasi lintas sektor dan penanganan gangguan keamanan.	Optimalisasi tata kelola urusan pemerintahan umum yang terkoordinasi melalui penguatan peran Forkopimcam dan penguatan integritas sosial masyarakat.	Penguatan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penataan ruang pelayanan yang nyaman, penyediaan sarana digital, serta optimalisasi layanan PATEN menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem pengaduan publik juga diperkuat untuk memastikan transparansi dan responsivitas layanan.</p>	<p>Penguatan partisipasi dan kapasitas masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Kecamatan berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK, karang taruna, RT/RW, serta posyandu. Selain itu, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong untuk menjadi instrumen ekonomi lokal yang mendukung kemandirian desa. Peningkatan kualitas pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) desa dan kecamatan juga menjadi fokus, sebagai upaya mendorong perencanaan yang inklusif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.</p>	<p>Menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan kewilayahan dengan memperkuat peran dan sinergi antarinstansi yang tergabung dalam struktur pemerintahan kewilayahan, seperti unsur kepolisian, TNI, dan instansi teknis lainnya. Sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban ditingkatkan melalui penguatan mekanisme komunikasi internal serta pelaksanaan forum koordinasi yang terjadwal dan responsif terhadap dinamika sosial.</p>	<p>Penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menuntut koordinasi lintas sektor yang kuat dan responsif, terutama dalam merespons isu-isu sosial, menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan, dan menumbuhkan ketahanan sosial masyarakat. Sinergi antarinstansi seperti kecamatan, kepolisian sektor, koramil, dan unsur keagamaan untuk menyatukan langkah kebijakan di wilayah. Selain penguatan koordinatif, strategi ini juga mencakup pembinaan wawasan kebangsaan melalui berbagai kegiatan edukatif dan dialog kebangsaan bersama tokoh masyarakat, pelajar, pemuda, dan organisasi sosial.</p>	<p>Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembinaan dilakukan sebagai dasar rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola desa. Kecamatan berperan sebagai fasilitator utama yang memastikan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berjalan akuntabel dan transparan.</p>

### **3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kabuh Tahun 2025–2029, operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) menjadi komponen penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara terukur, konsisten, dan akuntabel. Operasionalisasi NSPK tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan kewenangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya konkret untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang.

Tugas kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan, penerapan NSPK dilakukan melalui penyesuaian berbagai aspek teknis dan prosedural dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini antara lain mencakup penyesuaian terhadap standar waktu penyelesaian pelayanan administrasi, penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang sesuai dengan ketentuan pusat, pengelolaan layanan administrasi terpadu (PATEN) yang mencakup jenis layanan wajib, serta prosedur pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelayanan. Seluruh aspek tersebut mengacu pada ketentuan-ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian sektoral lainnya, termasuk pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Implementasi NSPK tersebut dijalankan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang, khususnya pada kebijakan yang mendorong restrukturisasi kebijakan daerah agar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterjangkauan layanan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, strategi operasionalisasi NSPK

diarahkan untuk mendukung terwujudnya sinergitas antarunit kerja dalam lingkungan kecamatan, memperkuat kolaborasi antara kecamatan dengan desa serta lintas sektor kewilayahan, dan memastikan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Kabuh terselenggara secara konsisten, transparan, dan sesuai standar nasional.

**Tabel 3.3**  
**Tehnik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Kecamatan dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti standar waktu pelayanan, alur SOP pelayanan, jenis layanan PATEN, dan prosedur pelibatan masyarakat	Restrukturisasi kebijakan daerah yang difokuskan untuk meningkatkan dampak positif pelaksanaan program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.	<p>Penguatan sinergi antarunit internal kecamatan dan kolaborasi lintas sektor di tingkat kewilayahan melalui forum koordinasi, integrasi pelayanan berbasis digital dengan Langkah konkret berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang representatif dan ramah masyarakat, termasuk ruang pelayanan, peralatan digital, serta fasilitas pendukung.</li> <li>2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti, mudah diakses, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.</li> <li>3. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.</li> </ol>	

			<p>4. Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan partisipatif (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes).</p> <p>5. Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan ketenteraman.</p> <p>6. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui penguatan peran Forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.</p> <p>7. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan edukatif dan pelibatan masyarakat, terutama pemuda, tokoh masyarakat, dan lembaga desa.</p> <p>8. Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan desa.</p>	
--	--	--	---	--

**Tabel 3.4**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi	: MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA		
Misi	: Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana prasarana dan sistem pelayanan administratif.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang representatif dan ramah masyarakat, termasuk ruang pelayanan, peralatan digital, serta fasilitas pendukung.
			2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti, mudah diakses, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan
		2. Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat desa peningkatan kualitas partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.	1. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.
			2. Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan partisipatif (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes).
		3. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.	
		3. Penguatan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui optimalisasi peran dan koordinasi lintas sektor dan penanganan gangguan keamanan.	1. Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan ketenteraman.

			2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui penguatan peran Forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan
		4. Penguatan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa	1. Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan desa.
	2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	1. Peningkatan Pemahaman ASN tentang Reformasi Birokrasi	1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait bimbingan, sosialisasi, atau internalisasi rutin Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan, monitoring, evaluasi sekaligus analisis capaian kinerja ASN
		2. Memperkuat Budaya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kecamatan termasuk penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja	1. Meningkatkan kualitas regulasi internal terkait reward and punishment yang mendorong penerapan budaya kerja berbasis reformasi birokrasi dan hasil kerja nyata

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung

langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kabuh pada periode Tahun 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kabuh adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Subkegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan**

### **Publik**

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## **3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## **4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Subkegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kabuh Tahun 2025–2029 merupakan hasil dari proses *cascading* yang sistematis dan terukur, yang diturunkan dari rumusan tujuan, sasaran, outcome, dan output kinerja perangkat daerah. Penyusunan program dan kegiatan ini sepenuhnya mengacu pada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri serta pemutakhiran regulasinya, khususnya terkait integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan demikian, seluruh unsur program dan subkegiatan memiliki dasar hukum dan teknis yang sah serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Rangkaian program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara bertahap dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran Renstra secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, tahun 2030 diposisikan secara eksplisit sebagai tahun penguatan keberlanjutan, sekaligus menjadi landasan awal bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2030. Program dan kegiatan pada tahun tersebut diarahkan untuk memastikan konsistensi arah kebijakan, menjaga kesinambungan pelaksanaan program strategis, dan menjadi titik transisi menuju siklus perencanaan pembangunan daerah berikutnya. Dengan demikian, dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi acuan lima tahunan, tetapi juga memberikan pondasi yang kuat bagi kesinambungan dan integrasi perencanaan tahunan secara utuh dan terpadu. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Kabuh</b>									
- Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan				Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)				
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)			
					Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
						Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
						Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
					Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kabuh		Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Kabuh		Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabuh		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.983.428.980,00		6.132.554.194,00		6.290.334.305,00		3.454.801.921,00		3.627.286.539,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.620.502.480,00		5.751.139.619,00		5.889.674.000,00		3.034.058.601,00		3.185.376.053,00		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabuh	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	72.97	73.50	2.620.502.480,00	74	5.751.139.619,00	74.50	5.889.674.000,00	75	3.034.058.601,00	75.50	3.185.376.053,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Kabuh	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.208.500,00		10.618.925,00		11.049.871,00		11.502.365,00		11.772.005,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	10.208.500,00	5	10.618.925,00	5	11.049.871,00	5	11.502.365, 00	5	11.772.005,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.658.500,00		4.891.425,00		5.135.996,00		5.392.796,00		5.662.436,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	4.658.500,00	2	4.891.425,00	2	5.135.996,00	2	5.392.796,00	2	5.662.436,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.550.000,00		3.727.500,00		3.913.875,00		4.109.569,00		4.109.569,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	3.550.000,00	5	3.727.500,00	5	3.913.875,00	5	4.109.569,00	5	4.109.569,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00		

7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.143.122.230,00		2.250.086.781,00		2.362.691.120,00		2.480.925.676,00		2.605.071.959,00		
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2.143.122.230,00	1	2.250.086.781,00	1	2.362.691.120,00	1	2.480.925.676,00	1	2.605.071.959,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	14		14		14		14		14			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.060.308.530,00		2.163.132.396,00		2.271.389.016,00		2.385.058.467,00		2.504.411.390,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	14	2.060.308.530,00	14	2.163.132.396,00	14	2.271.389.016,00	14	2.385.058.467,00	14	2.504.411.390,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				82.398.000,00		86.517.900,00		90.843.795,00		95.385.985,00		100.155.284,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	82.398.000,00	12	86.517.900,00	12	90.843.795,00	12	95.385.985,00	12	100.155.284,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				415.700,00		436.485,00		458.309,00		481.224,00		505.285,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	415.700,00	1	436.485,00	1	458.309,00	1	481.224,00	1	505.285,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.600.000,00		10.080.000,00		10.584.000,00		11.113.200,00		11.668.860,00		
Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	9.600.000,00	1	10.080.000,00	1	10.584.000,00	1	11.113.200,00	1	11.668.860,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				9.600.000,00		10.080.000,00		10.584.000,00		11.113.200,00		11.668.860,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	9.600.000,00	1	10.080.000,00	1	10.584.000,00	1	11.113.200,00	1	11.668.860,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				157.511.550,00		165.367.128,00		173.500.485,00		181.625.510,00		190.056.786,00		
Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	157.511.550,00	2	165.367.128,00	2	173.500.485,00	2	181.625.510,00	2	190.056.786,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.636.800,00		4.868.640,00		5.112.072,00		5.367.676,00		5.636.060,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	4.636.800,00	8	4.868.640,00	8	5.112.072,00	8	5.367.676,00	8	5.636.060,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.167.000,00		12.775.350,00		13.414.118,00		14.084.824,00		14.789.065,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	24	12.167.000,00	24	12.775.350,00	24	13.414.118,00	24	14.084.824,00	24	14.789.065,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				87.780.000,00		92.169.000,00		96.777.450,00		101.616.323,00		106.697.139,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	87.780.000,00	1	92.169.000,00	1	96.777.450,00	1	101.616.323,00	1	106.697.139,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.175.750,00		4.384.538,00		4.603.765,00		4.833.953,00		5.075.651,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	4.175.750,00	2	4.384.538,00	2	4.603.765,00	2	4.833.953,00	2	5.075.651,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.352.000,00		2.469.600,00		2.593.080,00		2.722.734,00		2.858.871,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	2.352.000,00	1	2.469.600,00	1	2.593.080,00	1	2.722.734,00	1	2.858.871,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.400.000,00		48.700.000,00		51.000.000,00		53.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	46.400.000,00	4	48.700.000,00	4	51.000.000,00	4	53.000.000,00	4	55.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				75.181.700,00		3.078.940.785,00		3.082.887.824,00		87.032.215,00		91.383.826,00		
Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	8	75.181.700,00	8	3.078.940.785,00	10	3.082.887.824,00	11	87.032.215,00	12	91.383.826,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		1		1		0		0			
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		-		-		

Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	0	-	0	-		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.181.700,00		78.940.785,00		82.887.824,00		87.032.215,00		91.383.826,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	8	75.181.700,00	8	78.940.785,00	10	82.887.824,00	11	87.032.215,00	12	91.383.826,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.080.000,00		156.534.000,00		164.360.700,00		172.259.635,00		180.822.617,00		
Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	25	149.080.000,00	25	156.534.000,00	25	164.360.700,00	25	172.259.635,00	25	180.822.617,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.280.000,00		46.494.000,00		48.818.700,00		51.259.635,00		53.822.617,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	44.280.000,00	12	46.494.000,00	12	48.818.700,00	12	51.259.635,00	12	53.822.617,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				104.800.000,00		110.040.000,00		115.542.000,00		121.000.000,00		127.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	25	104.800.000,00	25	110.040.000,00	25	115.542.000,00	25	121.000.000,00	25	127.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.798.500,00		79.512.000,00		84.600.000,00		89.600.000,00		94.600.000,00		
Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	75.798.500,00	3	79.512.000,00	3	84.600.000,00	3	89.600.000,00	3	94.600.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6		6		6		6					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10		10		10		10					
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.590.000,00		54.169.500,00		56.800.000,00		59.700.000,00		62.700.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	51.590.000,00	10	54.169.500,00	10	56.800.000,00	10	59.700.000,00	10	62.700.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.358.500,00		15.000.000,00		17.000.000,00		18.500.000,00		20.000.000,00		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	14.358.500,00	3	15.000.000,00	3	17.000.000,00	3	18.500.000,00	3	20.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.850.000,00		10.342.500,00		10.800.000,00		11.400.000,00		11.900.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	9.850.000,00	6	10.342.500,00	6	10.800.000,00	6	11.400.000,00	6	11.900.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.640.000,00		14.663.750,00		15.571.938,00		16.400.535,00		17.350.562,00		
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	75,50	13.640.000,00	77	14.663.750,00	77,50	15.571.938,00	78	16.400.535,00	78,50	17.350.562,00	7.01.0.00.0.00.07.00	00 - Kecamatan Kabuh
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				13.640.000,00		14.663.750,00		15.571.938,00		16.400.535,00		17.350.562,00		
Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	13.640.000,00	12	14.663.750,00	12	15.571.938,00	12	16.400.535,00	12	17.350.562,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	4		4		4							
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5.865.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.400.000,00		7.900.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	4	5.865.000,00	4	6.500.000,00	4	7.000.000,00	4	7.400.000,00	4	7.900.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.775.000,00		8.163.750,00		8.571.938,00		9.000.535,00		9.450.562,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	7.775.000,00	12	8.163.750,00	12	8.571.938,00	12	9.000.535,00	12	9.450.562,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				146.260.000,00		153.573.000,00		161.251.651,00		169.314.234,00		177.779.946,00		
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	75,50	146.260.000,00	76	153.573.000,00	76,50	161.251.651,00	77	169.314.234,00	77,50	177.779.946,00	7.01.0.00.0.00.07.00	00 - Kecamatan Kabuh
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				146.260.000,00		153.573.000,00		161.251.651,00		169.314.234,00		177.779.946,00		

Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	96	96	146.260.000,00	96	153.573.000,00	96	161.251.651,00	96	169.314.234,00	96	177.779.946,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				23.885.000,00		25.079.250,00		26.333.213,00		27.649.874,00		29.032.368,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	96	96	23.885.000,00	96	25.079.250,00	96	26.333.213,00	96	27.649.874,00	96	29.032.368,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				122.375.000,00		128.493.750,00		134.918.438,00		141.664.360,00		148.747.578,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	122.375.000,00	4	128.493.750,00	4	134.918.438,00	4	141.664.360,00	4	148.747.578,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.370.000,00		14.038.500,00		14.740.425,00		15.477.446,00		16.251.318,00		
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	40,50	13.370.000,00	50	14.038.500,00	51,50	14.740.425,00	52	15.477.446,00	52,50	16.251.318,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Kabuh	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				13.370.000,00		14.038.500,00		14.740.425,00		15.477.446,00		16.251.318,00		
Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	13.370.000,00	12	14.038.500,00	12	14.740.425,00	12	15.477.446,00	12	16.251.318,00		
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>		
<b>(01)</b>	<b>(02)</b>	<b>(03)</b>	<b>(04)</b>	<b>(05)</b>	<b>(06)</b>	<b>(07)</b>	<b>(08)</b>	<b>(09)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>	<b>(14)</b>	<b>(15)</b>
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				13.370.000,00		14.038.500,00		14.740.425,00		15.477.446,00		16.251.318,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	13.370.000,00	12	14.038.500,00	12	14.740.425,00	12	15.477.446,00	12	16.251.318,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				180.016.500,00		189.017.325,00		198.468.191,00		208.391.600,00		218.811.180,00		

Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	75.50	180.016.500,00	76	189.017.325,00	76.30	198.468.191,00	76.50	208.391.600,00	77	218.811.180,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Kabuh
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				180.016.500,00		189.017.325,00		198.468.191,00		208.391.600,00		218.811.180,00	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	180.016.500,00	4	189.017.325,00	4	198.468.191,00	4	208.391.600,00	4	218.811.180,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	100		100		100						
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				127.126.500,00		133.482.825,00		140.156.966,00		147.164.814,00		154.523.055,00	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	100	127.126.500,00	100	133.482.825,00	100	140.156.966,00	100	147.164.814,00	100	154.523.055,00	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				52.890.000,00		55.534.500,00		58.311.225,00		61.226.786,00		64.288.125,00	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	52.890.000,00	4	55.534.500,00	4	58.311.225,00	4	61.226.786,00	4	64.288.125,00	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				9.640.000,00		10.122.000,00		10.628.100,00		11.159.505,00		11.717.480,00	
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	75.50	9.640.000,00	76	10.122.000,00	76.50	10.628.100,00	77	11.159.505,00	77.50	11.717.480,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Kabuh
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				9.640.000,00		10.122.000,00		10.628.100,00		11.159.505,00		11.717.480,00	
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32	32	9.640.000,00	32	10.122.000,00	32	10.628.100,00	32	11.159.505,00	32	11.717.480,00	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9.640.000,00		10.122.000,00		10.628.100,00		11.159.505,00		11.717.480,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32	32	9.640.000,00	32	10.122.000,00	32	10.628.100,00	32	11.159.505,00	32	11.717.480,00	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Daftar Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	<b>NIHIL</b>			0
				0

Program di Kecamatan mendukung pembangunan daerah dan sebagai fungsi pengkoordinasian, namun program tersebut belum intervensi secara langsung pada prioritas pembangunan daerah.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 diwujudkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berlaku mulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang secara langsung merepresentasikan capaian kinerja Perangkat Daerah selama periode perencanaan lima tahunan, sekaligus menjadi bentuk komitmen nyata dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator yang relevan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta diturunkan dari keterkaitan logis antara tujuan dan sasaran Renstra dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Seluruh indikator ini dirancang agar mampu menggambarkan seberapa efektif Perangkat Daerah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator kinerja Utama (IKU) mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan sebagai berikut

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Kabuh									
2.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks	-	75	75,4	75,7	75,9	76,3	76,5	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	66,39	70	71	72	73	74	75	
4.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	8,76	8,8	8,81	8,82	8,83	8,84	8,85	

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) berlaku dari tahun 2025 hingga Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 – KECAMATAN										
2.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	positif	Indeks	-	75	75,4	75,7	75,9	76,3	76,5	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang bersifat strategis, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabuh Tahun 2025– 2029 disusun untuk memberikan arah kebijakan yang sistematis dan terukur dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Renstra ini merupakan dokumen operasionalisasi dari arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, serta menjabarkan secara teknis peran Kecamatan Kabuh dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah. Seluruh isi dokumen ini dirancang untuk memperkuat fungsi kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan kewilayahan dan penyelenggara pelayanan publik tingkat pertama. Penyusunan Renstra ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menegaskan perlunya penyelarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen RPJMD serta mendorong penguatan kinerja pelayanan publik melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis hasil (*result-oriented planning*).

Dokumen ini memuat hubungan kausal yang terstruktur antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, hingga subkegiatan, dengan memperhatikan klasifikasi dan nomenklatur perencanaan sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional. Penyusunan program dari tahun 2026 hingga 2030 tidak hanya ditujukan untuk menjawab tantangan jangka menengah, tetapi juga untuk menjamin kesinambungan arah pembangunan hingga akhir periode pelaksanaan RPJPD. Secara khusus, program dan kegiatan pada tahun 2030 dirancang sebagai pijakan awal dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun tersebut, sehingga tidak hanya menjadi penutup periode Renstra, tetapi sekaligus menjadi jembatan menuju periode perencanaan berikutnya.

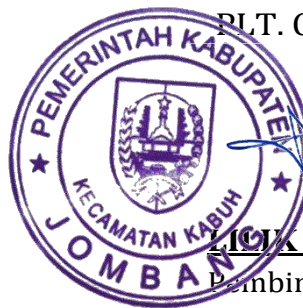
Pelaksanaan Renstra ini juga berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh rencana yang tertuang, dibutuhkan sistem pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala, berjenjang, dan menyeluruh. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan evaluasi mencakup analisis terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU),

indikator program, serta efektivitas kebijakan dan strategi yang dijalankan. Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai keberhasilan, tetapi juga menjadi masukan penting dalam perbaikan rencana kerja tahunan, pemutakhiran data dan informasi, serta penyusunan dokumen perencanaan di masa yang akan datang.

Dengan demikian, dokumen Renstra Kecamatan Kabuh Tahun 2025–2029 ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman administratif dan legal formal semata, melainkan juga menjadi kompas strategis yang mampu memandu seluruh unsur pelaksana kecamatan dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan implementasi dokumen ini sangat ditentukan oleh komitmen kolektif, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan pengawasan yang dilakukan secara konsisten.

Kabuh, 19 September 2025

PLT. CAMAT KABUH



**ICI YARKONI, SH., M.E**

Pembina

NIP. 19690312 199202 1 002